

**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
MUSRENBANG RKPD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

Bangka Tengah, 5 April 2018

- Yth. Sdr. Menteri PPN/Kepala Bappenas;**
- Yth. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi;**
- Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;**
- Yth. Sdr. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;**
- Yth. Sdr. Ketua DPRD Prov. Kepulauan Bangka Belitung;**
- Yth. Sdr. Unsur Pimpinan Instansi Vertikal;**
- Yth. Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**
- Yth. Sdr. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;**
- Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;**
- Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi;**
- Para undangan serta Hadirin yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Dalam kesempatan ini, Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyelenggaraan Musrenbang ini, yang Saya yakini telah melalui tahapan panjang, mulai dari Musrenbang desa/kelurahan sampai dengan Musrenbang kabupaten/kota. Forum Musrenbang RKPD ini mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyesuaian, dan klarifikasi atas program/kegiatan yang diusulkan sehingga tercapai kesepakatan terhadap materi rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Hadirin Peserta Musrenbang yang Berbahagia,

Saya memberikan apresiasi atas pencapaian pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini. Hal ini tentunya merupakan perwujudan dari NAWA CITA yang diharapkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia serta kerja keras dari seluruh aparat pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saya banggakan.

Berbicara mengenai perencanaan, kita sadari bahwa Tahun 2019 merupakan tahun terakhir untuk pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 dan tahun terakhir pemerintahan Jokowi –

JK, untuk itu kita melihat tahun ini bukan sebagai tahun biasa dan sebagai sesuatu yang rutin. Mengapa? karena masih terdapat beberapa target Nawacita 2015 - 2019 yang belum selesai sehingga masih memerlukan upaya dan kerja keras.

Walaupun demikian, Saya memandang bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memiliki “pekerjaan rumah” di dalam mewujudkan visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercantum dalam **Perda Nomor 14 Tahun 2017** tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, yaitu: *“Babel sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi”*.

Hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan selama ini bagi percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2017, yaitu antara lain:

- laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,51%;
- angka kemiskinan sebesar 5,30%;
- IPM sebesar 69,92%;
- gini ratio sebesar 0,28%;
- tingkat pengangguran sebesar 3,78%; dan
- inflasi sebesar 3,13%.

Seyogyanya RKPD Tahun 2019 memuat program dan kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2019 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target makro yang menjadi tanggung jawab Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain: (1) target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 - 5,3%; (2) kemiskinan 4,15%; (3) tingkat pengangguran 5,6%; dan (4) inflasi 6,1%.

Oleh karena itu perlu upaya maksimal untuk mengejar target tersebut antara lain:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur;
2. penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia;
3. Deregulasi dan debirokratisasi;
4. Menjaga stabilitas harga bahan pokok;
5. Mensukseskan program bantuan sosial yang digagas pemerintah dengan baik; dan
6. Penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran.

Saya berharap bahwa pemilihan tema “***Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas***” pada Musrenbang RKPD Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, dapat mendukung tema RKP Nasional Tahun 2019 yaitu “***Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas***”. Penetapan tema RKPD Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah;
2. Kemandirian pangan rendah;
3. Pengendalian inflasi;
4. Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah;
5. Tingkat investasi rendah;
6. Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik;
7. Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas;
8. Tingkat pendidikan SDM masih rendah;
9. Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas;
10. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal;
11. Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif;
12. Rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup; dan

13. Penanggulangan bencana.

Bapak dan ibu, para peserta Musrenbang yang berbahagia,

Untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang sinergi dalam pencapaian target pembangunan nasional, serta menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai tahun 2017 telah diselenggarakan Koordinasi Teknis (Kortek) Pembangunan yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan Koordinasi teknis perencanaan pembangunan (kortekrenbang), pada 2 (dua) regional yaitu Regional I (Sumatera, Jawa dan Bali) di Yogyakarta dan Regional II (Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) di Mataram. Forum tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi masing-masing program/kegiatan untuk mencapai target pembangunan nasional melalui penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Hasil dari kortekrenbang tersebut diharapkan menjadi masukan dalam rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Sebagai gambaran terkait hasil kortekrenbang untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Form 1a, Usulan provinsi terhadap program/kegiatan K/L yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 204 proyek, yang sudah dibahas/disepakatisebanyak 86 Proyek;
2. Form 1b, Usulan proyek daerah yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 765 proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 256 Proyek;

3. Form 3, Usulan Program/kegiatan kabupaten/kota yang mendukung Prioritas Nasional sebanyak 488 proyek, yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 103 proyek.

Beberapa proyek K/L yang mendukung Proritas Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan;
2. Pembuatan bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan (Dam Penahan dan Gully Plug);
3. Kebun benih semai / Kebun benih klon / Areal Sumber Daya Genetik;
4. Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan;
5. Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara;
6. Sarana dan prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan;
7. Optimalisasi reproduksi;
8. Fasilitas penerapan budidaya padi;
9. Fasilitas penerapan budidaya jagung dan sereal lainnya;
10. Pembangunan embung pertanian; dan
11. Pengembangan sumber air.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Satu catatan yang perlu kita perhatikan bersama atas amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan, Daerah harus memprioritaskan belanjanya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Pelayanan dasar diterjemahkan sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara Indonesia agar hidup layak.

Dengan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, mengamanatkan bahwa Standar pelayanan

minimal (SPM) merupakan wujud kehadiran negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga negara Indonesia. Dengan implementasi SPM, diharapkan salah satu tujuan pembangunan daerah yaitu pemerataan hasil pembangunan dapat segera tercapai. Posisi strategis SPM, di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 juga mengingatkan agar Daerah wajib merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dimaksud.

Selain memprioritaskan pada terwujudnya SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, besar harapan saya agar RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat mengarahkan proporsi pendanaan indikatif pada belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung. Hal ini belum terlihat pada perda APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, yang menunjukkan bahwa Belanja tidak Langsung masih lebih besar daripada Belanja Langsung, ini mengindikasikan bahwa anggaran langsung untuk pembangunan daerah seperti infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat belum terproporsikan dengan baik, sehingga proses penganggaran perlu diarahkan kepada hal-hal yang terkait dengan belanja langsung dan dapat berdampak positif terhadap kepuasan publik atas pelayanan pemerintah.

Sedangkan terkait dengan lebih besarnya Dana Perimbangan dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diterima, seyogyanya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah PAD sehingga tercipta kemandirian daerah agar pada akhirnya ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikurangi.

Peserta Musrenbang yang berbahagia,

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga masih menghadapi tantangan lain yang juga harus mendapatkan perhatian yaitu Kondisi Luar Biasa (KLB) Stunting di Kabupaten Bangka Barat terdapat sebanyak kurang lebih 8.902 balita;

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemda untuk menanggulangi penyebaran KLB ini, antara lain:

1. Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
2. Melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten dan Kota;
3. Sinkronisasi RKPD 2019;
4. Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 100 daerah intervensi stunting untuk mendapatkan NIK dan AKTE;
5. Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah; dan
6. Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM dalam dokumen anggaran.

Bapak dan Ibu yang berbahagia,

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan elektronifikasi merupakan aspek penting menuju penerapan konsep *smart city* yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki pelayanan pemerintah kota untuk menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.

Kota yang baik adalah yang bisa melihat tujuannya dengan jelas dalam konsep ekonomi, berbudaya dan lingkungan. Apabila terjadi pembiaran maka akan terjadi gap antara persoalan-persoalan kota dan solusinya, contohnya semakin hari makin macet dan banjir. Untuk itu perlu dicari strategi, dan ini perlu dilakukan bersama dengan masyarakat.

Smart City tidak selalu untuk kota yang harus mempunyai akses internet yang memadai dan berbasis IT. *Smart city* adalah kota yang bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya sehingga warganya bisa hidup nyaman aman dan berkelanjutan.

Seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diusulkan untuk ditetapkan sebagai *smart city* oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan diupayakan dapat tercapai pada Tahun 2019.

Hadirin yang berbahagia,

Hal lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pemanfaatan dana desa. Dimana Desa merupakan sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh pemerintah. Maka sejak tahun 2015 pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalamnya ada kewajiban pemerintah memberikan Dana Desa.

Dana Desa dibelanjakan pada dua hal yakni proyek infrastruktur dasar dan sistem penyediaan administrasi umum pedesaan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penyediaan mandi cuci kakus (MCK) yang memadai kerap menjadi kendala kemajuan desa. Keberadaan jalan menjadi prasyarat untuk menyalurkan hasil bumi ke luar desa dan sebaliknya menyalurkan barang dan jasa bagi kebutuhan warga desa.

Pembangunan Perdesaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan

lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Untuk Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan Dana Desa sebanyak 264,6 M untuk 309 desa di enam kabupaten, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur.

Atas dasar hal tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pemerintah daerah dan desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:

1. Penguatan kapasitas Pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi desa menyusun RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; dan
4. Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengawal pelaksanaan Program Padat Karya Tunai.

Hadirin yang saya banggakan,

Pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan kemudahan berusaha semakin diperbaiki dan dipermudah. Hal ini terlihat dari meningkatnya peringkat daya saing Indonesia ke posisi 36 dari 137 negara. Hal itu salah satunya terlihat di Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya penyederhanaan layanan baik perizinan

maupun nonperizinan yaitu dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Tercatat seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki PTSP.

Hal yang perlu untuk terus dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan keberadaan PTSP sehingga benar-benar mampu memberikan kemudahan dan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam berusaha bagi masyarakat.

Hadirin yang saya banggakan,

Terkait dengan batas wilayah masih terdapat permasalahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan posisi Pulau Tujuh, permasalahan sengketa batas wilayah antara Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang, serta Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang.

Untuk itu, perlu ditingkatkan kembali koordinasi untuk mengatasi hambatan dan memecahkan permasalahan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sehingga penegasan batas daerah di wilayah masing-masing dapat diselesaikan.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam melakukan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, seluruh elemen bangsa Indonesia perlu bersatu padu untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban yang kondusif. Hal ini akan mewujudkan kepercayaan dunia internasional untuk mendukung perkembangan perekonomian Indonesia yang pada

akhirnya akan membantu terwujudnya Indonesia yang sejahtera.

Akhir-akhir ini aksi terorisme, penyebaran isu yang kebenarannya sangat diragukan, penyebarluasan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45 dan hal lainnya yang mengganggu penyelenggaraan pembangunan Indonesia, semakin meningkat. Demikian halnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking*, peredaran dan penggunaan miras, narkoba, psikotropika yang telah menelan korban jiwa. Secara keseluruhan telah menimbulkan *image* negatif atas bangsa Indonesia.

Tahun 2019 merupakan tahun politik yang perlu disikapi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang aman tertib dan kondusif. Untuk itu pemerintahan daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), seluruh jajaran tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa, untuk secara terkoordinasi melakukan pencegahan dan menangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan terbit dalam pemilihan umum Tahun 2019.

Hadirin yang berbahagia,

Kementerian Dalam Negeri selalu membuka diri untuk bersama-sama dengan seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dalam upaya pembinaan terhadap pemerintahan daerah sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemerintah Daerah diharapkan aktif memberikan dukungan, informasi, masukan, kritikan yang dibutuhkan dalam menciptakan Pemerintahan Nasional yang efektif.

Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan agar RKP

Tahun 2019 selaras dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan RKP Tahun 2019. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan juga mengawal konsistensi baik penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2019 mendatang, maupun dalam pelaksanaannya.

Hanya dengan komitmen yang tinggi dan bekerjasama dengan melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dapat membangun dan berkontribusi pada perwujudan “*Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*” sesuai dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2015-2019.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah. Selanjutnya saya mengucapkan, selamat mengikuti Musrenbang RKPD Tahun 2019 untuk mewujudkan “*Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas*”.

**Sekian dan Terima kasih,
Wabillahit Taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO